**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Magister Hukum

Universitas Dharmawangsa

**OLEH :**

**PUTRI ISMAIRIFA**

**NPM : 21911008**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

JUDUL TESIS :

Nama : **Putri Ismairifa**

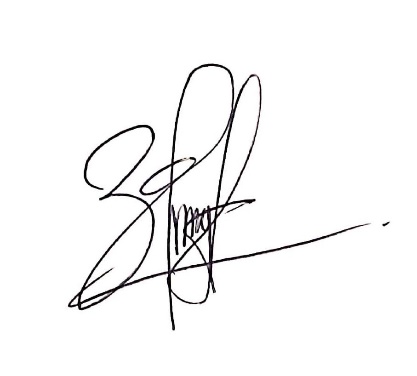
Npm : 21911008

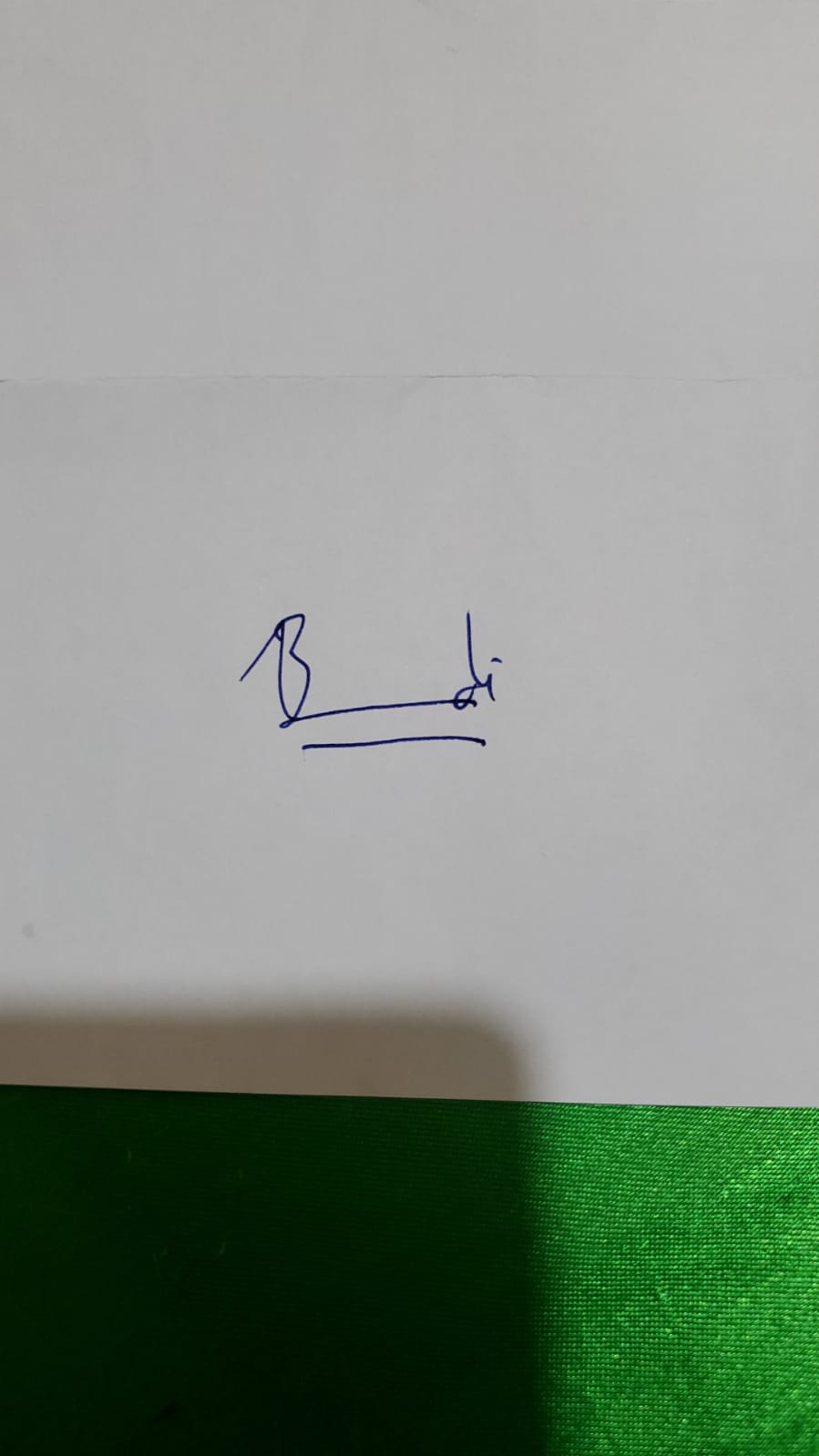
Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**



 Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.H Dr. Budi Bahreisy, SH, M.H**

**NIDN : 0109027604 NIDN : -**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

JUDUL TESIS :

Nama : **Putri Ismairifa**

Npm : 21911008

Program Studi : Magister Hukum

Tanggal Lulus : 14 April 2023

Telah Dipertahankan dan Disahkan Disidang Penguji :

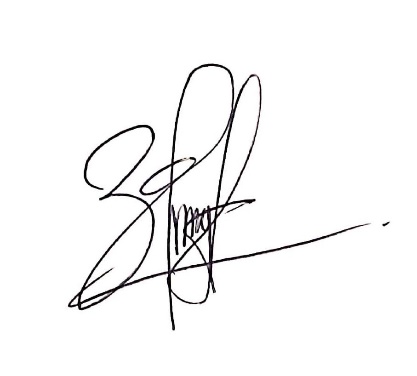
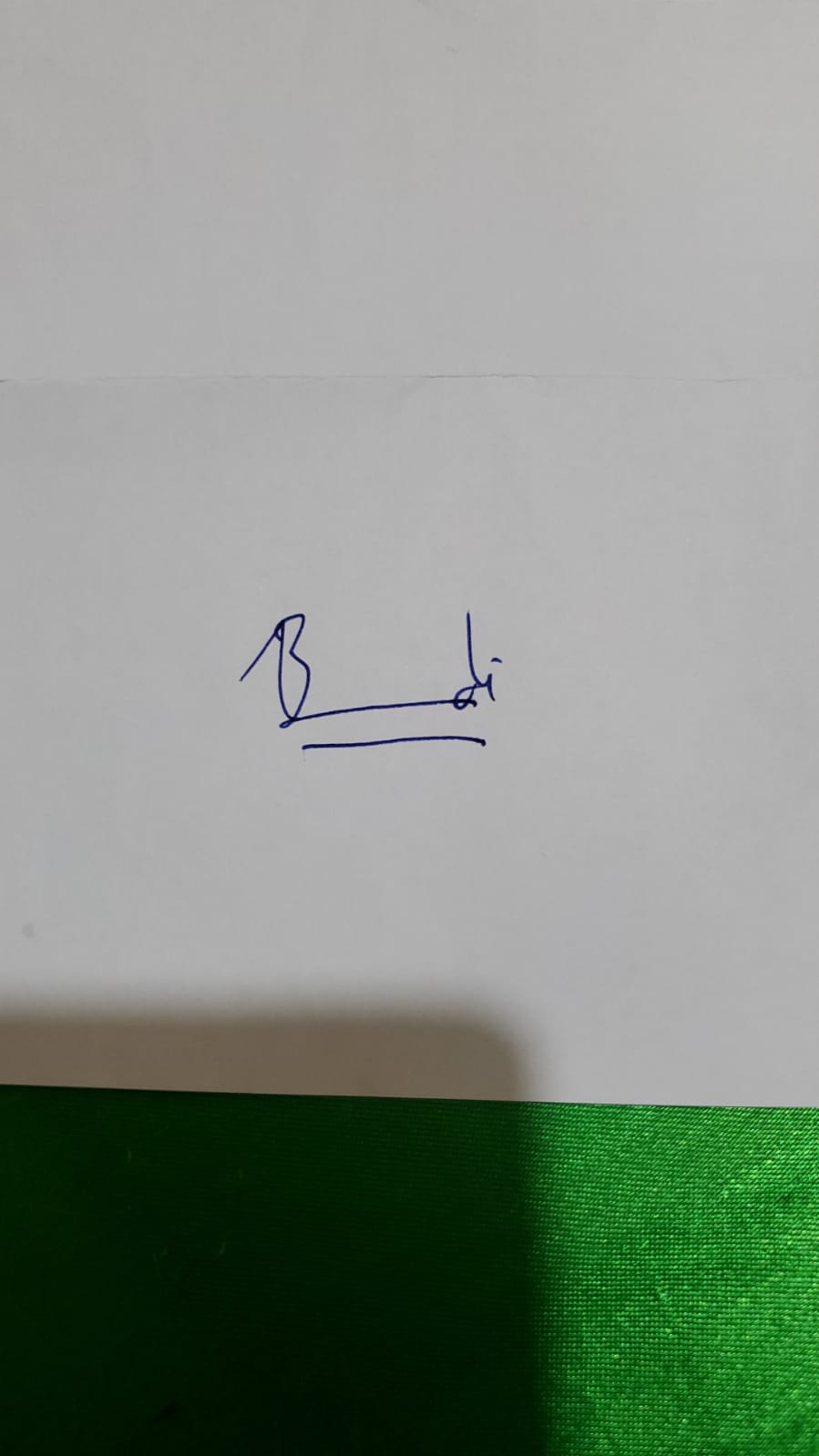
Pada Tanggal : 14 April 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Ketua

Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

**NIDN : 0113028704**



Pembimbing I Pembimbing II

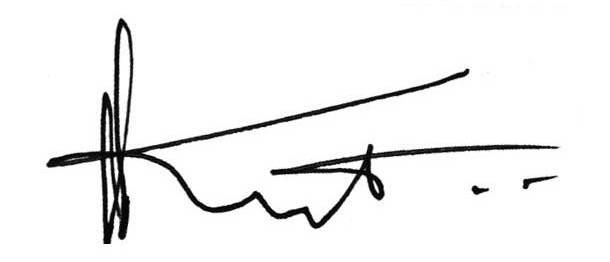
**Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.H Dr. Budi Bahreisy, SH, M.H**

**NIDN : 0109027604 NIDN : -**

Penguji III

Mengetahui

Direktur Sekolah Pascasarjana



Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum

NIDN : 0029125702

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN : 0029125702**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

**Telah Diuji Pada :**

**Tanggal : 14 April 2023**

**TIM PENGUJI TESIS :**

Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Anggota : 1. Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.H

2. Dr. Budi Bahreisy, SH, M.H

3. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Ismairifa

NPM : 21911008

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 04 Juli 1991

Pekerjaan : -

Agama : Islam

Alamat : Jl. Tempuling Gg. Ibu No 1a Kel Sidorejo Kec. Medan tembung Kota Medan

Progam Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik Sarjana dan Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan 14 April 2023

Yang menyatakan,

**Putri Ismairifa**

**PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Ismairifa

NPM : 21911008

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 04 Juli 1991

Pekerjaan : -

Agama : Islam

Alamat : Jl. Tempuling Gg. Ibu No 1a Kel Sidorejo Kec. Medan tembung Kota Medan

Progam Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusive (Non Exclusive, Royalty Free Right) untuk mempublikasi tesis yang berjudul :

***Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012***

Dengan Hak Bebas Royalty Non Eksklusif ini Uniersitas Dharmawangsa berhak menyimpang, mengalihkan media/memfprmatkan, mengelola dalam bentuk pengakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan 14 April 2023

Yang menyatakan,

**Putri Ismairifa**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ismairifa

Alamat : Jl. Tempuling Gg. Ibu No 1a Kel Sidorejo Kec. Medan tembung Kota Medan

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 4 Juli 1991

Status : Sudah Kawin

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Jenjang Pendidikan

1. ..
2. ....
3. ..
4. S1 Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2013
5. S2 Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan Tahun 2023

Demikian Daftar Riwayat Hidup inisaya buat dengan sebenarnya

Medan 14 April 2023

Yang menyatakan,

**Putri Ismairifa**

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012**

**ABSTRAK**

**Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.H, Dr. Budi Bahreisy, SH, M.H**

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab dan upaya penanganannya. Anak-anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan karena melibatkan masa depan generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan pihak berwenang, pakar hukum, serta pelaku anak dan keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong anak-anak terlibat dalam tindak pidana narkotika meliputi lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pergaulan yang salah, serta kurangnya pengawasan dan pendidikan mengenai bahaya narkotika. Selain itu, sistem peradilan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus ini secara efektif dan rehabilitatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan program edukasi, pengawasan yang lebih ketat, serta pendekatan hukum yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman penjara, guna memastikan pemulihan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak pelaku tindak pidana narkotika.

Kata kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Anak.

i

***ABSTRACK***

**Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.H, Dr. Budi Bahreisy, SH, M.H**

This study discusses drug crimes committed by children, with a focus on the causal factors and efforts to deal with them. Children as perpetrators of drug crimes are an increasingly worrying phenomenon because they involve the future of the younger generation. This study uses a qualitative method with a case study approach, involving in-depth interviews with authorities, legal experts, and child perpetrators and their families. The results of the study indicate that the main factors that encourage children to be involved in drug crimes include a disharmonious family environment, bad relationships, and lack of supervision and education about the dangers of drugs. In addition, the juvenile justice system in Indonesia still faces various challenges in handling these cases effectively and rehabilitatively. This study recommends the need for increased education programs, stricter supervision, and a legal approach that focuses more on rehabilitation than imprisonment, in order to ensure recovery and a better future for child perpetrators of drug crimes.

Keywords : Crime, Drugs, Child

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012** ”.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa. Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Zamakhsyari Bin Hasballah Tayib, Lc., M.A selaku Rektor Universitas Dharmawangsa, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa Bapak Prof. Dr. Kusbianto,S.H.,M.Hum serta Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Bapak Dr. Ariman Sitompul, S.H.,M.H atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelelsaikan program Pasca Sarjana ini.
2. Terimakasih yang setinggi-tingginya diucapkan kepada dosen pembimbing I yaitu Ibu Dr. Azmiati Zuliah, S.H.,M.H dan dosen pembimbing II Bapak Dr. Budi Bahreisy, S.H.,M.H dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, waktu, ide serta gagasan sehingga Tesisi ini dapat selesai tepat waktu.
3. Terimakasih saya ucapkan dengan sepenuh hati kepada Suami tercinta saya Bapak Dian Hardian Silalahi, S.H.,M.H yang telah memberikan banyak dukungan kepada saya dari awal mula perkuliahan hingga penelitian Tesis ini selesai. Serta tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada kedua buah hati saya Alesha Dewi Rihardian Silalahi dan Afyaz Rihardian Silalahi yang telah memberikan dukungan, kekuatan dan seluruh rasa cintanya untuk saya.
4. Terimakasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Ibunda saya Tercinta Ibu Farida Mainani Sihombing, Am.Keb dan Ayahanda (Alm) Bapak M. Islam Sapta Darma serta Ayah dan ibu mertua saya yang telah menjadi motivator dikehidupan saya dan yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa baik untuk saya selama hidup saya.

ii

1. Terimakasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Ketua APHTN HAN Sumut Bapak Dr. Eka NAM Sihombing, SH.,M.Hum serta seluruh keluarga Tercinta saya yang banyak mendukungn serta memberikan motivasi hingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh staf pengajar yang ada di Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa
3. Serta saya ucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman seangkatan saya yang ada di Pasca sarjana Universitas Dharmawangsa.

Akhirnya saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun saya sadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semuanya dan tiada kata lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, amin.

**Wassalamualaikum wr wb.**

**Medan, 14 April 2023**

**Hormat Saya......**

**Penulis...........**

**Putri PUTRI ISMAIRIFA**

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR JUDUL ................................................................................**

**LEMBAR PERSETUJUAN.................................................................**

**LEMBAR PENGESAHAN .................................................................**

**LEMBAR TANGGAL PENGUJI.......................................................**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ...................................**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .........................................**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................**

**ABSTRAK ............................................................................................ i**

**ABSTRACK ......................................................................................... i**

**KATA PENGANTAR ..................... .......... ii**

**DAFTAR ISI ........ iii**

**BAB I PENDAHULUAN ........ 1**

1. Latar Belakang ......... 1
2. Rumusan Masalah ........ 12
3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ........ 12
4. Keaslian Penelitian ........ 14
5. Kerangka Teori dan Konsepsi ........ 15
6. Metode Penelitian ........ 27
   1. Tipe Penelitian ........ 27
   2. Metode Pendekatan .......... 28
   3. Jenis dan Sumber Data ........ 28

# BAB II PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA...................................................................... 30

# Definisi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak

iii

# PidanaNarkotika..................................................................... 30

# Peraturan Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap

# Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.................................. 31

# Peraturan Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap

# Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.................................. 35

# Analisis Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku

# Tindak Pidana Narkotika....................................................... 37

# BAB III FAKTOR PENYEBAB ANAK SEBAGAI PELAKU

# TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UU

# NO. 11 TAHUN 2012........................................................... 45

# Faktor Lingkungan dan Sosial Ekonomi................................ 45

# Faktor Keluarga dan Pendidikan........................................... 50

# Faktor Pergaulan dan Pemahaman Tentang Agama.............. 54

# Faktor Perkembangan Psikologis, Ketersediaan dan Rasa

# Ingin Tahu.............................................................................. 57

# BAB IV UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH

# DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA NARKOTIKA

# YANG DILAKUKAN OLEH ANAK............................. 61

# Pendidikan dan Sensitisasi Terhadap Anak.......................... 61

# Perlindungan dan Rehabilitasi Bagi Anak Pelaku Tindak

# pidana narkotika................................................................... 64

# Pengembangan Program Prevensi Tindak Pidana Narkotika

# Bagi Anak.............................................................................. 72

# Peningkatan Pemantauan dan Enforcement Bagi Anak ....... 80

# BAB V PENUTUP................................................................................ 88

# A Kesimpulan............................................................................ 88

# B. Saran...................................................................................... 90

# DAFTAR PUSTAKA............................................................................. 92

# 

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Anak adalah karunia terbesar Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai generasi penerus anak menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Ditinjau dari Aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa *(minderjarigheid /* *inferiority)* atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali *(minderjarige ondervoordij).* Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia *(ius constitutum / ius operatum)* tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.[[1]](#footnote-1)

Dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi adalah: pertama, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan untuk anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum.[[2]](#footnote-2)

1

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.[[3]](#footnote-3)

Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak yang masih butuh bimbingan dan arahan dapat menjadi sasaran yang tepat bagi para pengedar narkotika untuk dijadikan alat transaksi narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat serta terlibatnya anak di dalam pengedaran narkotika ini, harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum dan juga peran masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam menghindari semakin banyaknya anak yang terlibat kasus sebagai pengedar. Aparat Penegak Hukum dalam menghadapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus memperhatikan kaidah hukum yang berlaku untuk dapat menegakkan hukum dan juga tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

Pada zaman sekarang ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Dengan demikian, kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency. Juvenile delinquency* atau kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.[[4]](#footnote-4)

Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara. Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya. [[5]](#footnote-5)

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan sebelumnya berisi tentang sistem peradilan pidana anak dan disisi lain terdapat peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143), ketika Anak melakukan tindak pidana Narkotika maka Undang-undang yang mengatur saling bertentangan. Anak yang melakukan tindak pidana perlu diupayakan diversi, tetapi apabila ketentuan pidana melebihi 7 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan karena menyangkut tindak pidana khusus yaitu Narkotika dengan ancaman pidana melebihi 7 tahun

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.[[6]](#footnote-6)

Hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam Undang-Undang ini mengatur definisi anak, lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, dan ketentuan pidana. Dalam undang-undang tersebut juga membahas tentang pembedaan perlakuan dalam hukum maupun ancaman pemidanaannya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undangundang ini dimaksud untuk lebih memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui proses pembinaan akan menemukan jati dirinya menjadi manuasia yang lebih baik, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Konteks ini anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan “anak nakal”. Namun dalam Undang-Undanga Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak junto UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”. Dimana dalam Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidan dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.[[7]](#footnote-7) Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar undang-undang. Dalam Bab 5 Pasal 69 undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana dan tindakan.

Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis, yang merupakan kebutuhan paling memdasar dalam kehidupan manusia apalagi bagi seorang anak. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik diantara lain meliputi perlindungan anak di dalam hukum pidan materil dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan khusus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan pejatuhan sanksi.

Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.[[8]](#footnote-8)

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan hak terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 2 dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Pemberian advokasi sosial;
12. Pemberian kehidupan pribadi;
13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
14. pemberian pendidikan;
15. pemberian pelayanan kesehatan;
16. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk melaksanakannya. Selain itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum semata ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan, sampai pembinaan dalam lembaga dan pemulangannya di masyarakat, namun juga harus dimaknai akar permasalahannya, mengapa Anak melakukan tindak pidana dan upaya pencegahannya. karena sekarang ini sebagai dampak negatif pembangunan yang cepat diantaranya arus globalisasi dibidang informasi dan komunikasi, kemajuan pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang kurang kasih sayang, bimbingan, menyebabkan anak menjadi berhadapan dengan hukum.[[9]](#footnote-9)

Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.

Keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak hanya di edarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat perdesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak-anak dan lain sebagainya. Penyebaran narkotika pada kalangan anak-anak sudah sampai ke tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat memprihatinkan karena anak-anak adalah kaum muda generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Sehingga dari hal itu anak- anak harus memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus agar anak tersebut memiliki sikap dan mental yang baik dalam bertingkah laku.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat 1 pidana pokok bagi anak terdiri atas:

* 1. Pidana peringatan
  2. Pidana dengan syarat
     1. Pembinaan di luar lembaga;
     2. Pelayanan masyarakat;atau
     3. Pengawasan;
  3. Pelatihan kerja;
  4. Pembinaan dalam lembaga; dan
  5. Penjara.

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hukuman penjara adalah hukuman terakhir atau sanksi terakhir yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, tetapi pada fakta nya masih banyak anak-anak yang melawan hukum dijatuhi tindak pidana penjara khusunya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114, seorang kurir tersebut bisa dikategorikan sebagai perantara, namun dari segi hukuman seorang kurir disamakan dengan seorang penjual. Bagaimana jika pelaku nya adalah seorang anak seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Bandung yang terjadi diatas, apakah hukumannya sama dengan orang dewasa.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksudkan agar tercapainya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak sangat dijamin oleh negara, sehingga anak pelaku tindak pidana narkotika harus diperlakukan khusus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dari itu hakim anak harus bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana terutama tindak pidana narkotika yang sudah pada titik mengkhawatirkan.

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun tertarik untuk mengangkat masalah yang berjudul “**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa Permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika menurut UU No. 11 tahun 2012 ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Pemerintah dalam mencegah tindak pidana narkotika yang dilakuakan oleh anak ?

# Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui Faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika menurut UU No. 11 tahun 2012.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan Pemerintah dalam mencegah tindak pidana narkotika yang dilakuakan oleh anak.

# Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

# Manfaat Teoritis

# Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dan secara khusus dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

# Manfaat Praktis

# Bagi aparat penegak hukum

# Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan kewajibannya dan dapat menciptakan keadilan bagi anak dibawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan dari pemerintah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

# Bagi masyarakat

# Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga masyarakat tidak lagi mendapati anak-anak menjadi pelaku tindak pidana, sehingga ada kontrol dari masyarakat dalam memperhatikan anak-anak dilingkungannya. Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak masyarakat harus berperan sebagai kontrol sosial supaya anak tersebut tidak merasa diasingkan.

# Bagi kalangan akademis

# Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan akademis dalam realisasi perlindungan hak anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# Bagi penulis

# Penelitian ini menjadi penulisan hukum dan menjadi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister.

# Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian hukum yang berjudul, “Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012”. Merupakan karya asli bukan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Ada beberapa Tesis, skripsi dan jurnal dengan tema yang sama tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa tesis, skripsi, dan jurnal tersebut antara lain :

1. Elly Patma Jaya, NIM. 02012681721024, Universitas Sriwijaya, dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis. Rumusan Masalah :
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis ?
3. Apa Hambatan-hambatan Penegak Hukum dalam memberikan efek jera pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berstatus Residivis?
4. Bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum berstatus
5. Bilher Hutahaean, Universitas Trunajaya Bontang, dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. Rumusan masalah nya adalah bagaimana penerapan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Bontang bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama?
6. Halimah Nurmayanti, NIM: 11150450000078SANKSI Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian: Analisis Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS.

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian judul ini belum ada yang membahasnya sehingga penelitian ini dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

# Kerangka Teori dan Konsepsi

# Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifikasi atau proses tertentu terjadi.[[10]](#footnote-10) Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.[[11]](#footnote-11) Teori juga suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan suatu pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi penjelasan yang sifatnya umum.[[12]](#footnote-12)

# Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati mengenai Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012.[[13]](#footnote-13) Dalam dunia ini, teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, sedangkan kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.[[14]](#footnote-14)

# Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka teori yang tepat digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

# Teori Pemidanaan

# Pemidanaan didalam hokum Indonesia merupkan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumanya”.[[15]](#footnote-15) Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

# Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

# Teori pemidanaan dikenal adanya 2 (dua) macam teori pemidanaan. Yang pertama adalah teori absolut (teori pembalasan), yang mana teori ini adalah teori yang berorientasi ke belakang berupa *punnishment* atau pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang sudah dilakukan. Yang kedua yaitu teori Relatif ( teori tujuan), dimana teori ini adalah teori yang berorientasi ke depan berupa pemulihan trauma atau luka, baik trauma individual maupun social.

# Secara tradisional Teori-teori pemidanaan Anak pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :[[16]](#footnote-16)

# Teori Absolut atau Teori Pembalasan

# Teori absolut atau teori pembalasan suatu pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori absolut ini adalah:

# Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;

# Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung;

# Sarana untuk tujuan misalnaya untuk kesejahteraan masyarakat;

# Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

# Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

# Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang tujuannya;

# tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali penjahat.

# Teori Relatif

# Teori ini memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Suatu pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

# Adapun Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relatif ini adalah :

# Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;

# Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;

# Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;

# Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;

# Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.[[17]](#footnote-17)

# Pemidanaan anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*)

# Pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungan jawab pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil. Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini.

# Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

# Tujuan Pemidanaan seperti pada ketentuan Pasal 50 KUHP, menyebutkan bahwa pemidaan itu sendiri betujuan untuk:”

# mencegah dilakukannya suatu tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

# memasyarakatkan para terpidana dengan diadakannya pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan juga berguna;

# menyelesaikan suatu konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan yang terakhir adalah

# membebaskan rasa bersalah pada terpidana.” [[18]](#footnote-18)

# Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana yang meang sudah melakukan hal yang buruk atau tindak pidana juga manusia yangmasih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang lebih positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konfrensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang jadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :

# Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.

# Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.

# Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagian didunia maupun akhirat.

# Sedangkan berdasarkan Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964, dirumuskan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan pidana penjara sebagai berikut ini :

# Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepaanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. yakni masyarakat Indonesia yang menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum agi dan berguna dalam pembangunan negara.

# Menjatuhi pidana bukan tindakan balas denam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satusatunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.

# Tobat tidak dapat dcapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapiana dapat diikutsertakan dalam kegiatankegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa social dalam kehidupan bermasyarakat.[[19]](#footnote-19)

# Teori Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam sidang pengadilan.24

Pengertian pembuktian menurut para ahli, yaitu :

* + - 1. M. Yahya Harahap.

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman- pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktkan kesalahan yang dilakukan terdakwa.[[20]](#footnote-20)

* + - 1. R.Subekti dan Tjirosoedibyo.

Bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil dimuka pengadilan.[[21]](#footnote-21)

* + - 1. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:
         * Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Adb al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat menyakinkan orang lain.
         * Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan sutau perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.
         * Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.[[22]](#footnote-22)

Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.27

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

* + 1. Undang-undang
    2. Doktrin atau ajaran
    3. Yurisprudensi.[[23]](#footnote-23)
    4. **Teori Perlindungan Hukum**

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black’s Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.[[24]](#footnote-24)

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hokum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[[25]](#footnote-25)

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[[26]](#footnote-26)

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice.*

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

* 1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[[27]](#footnote-27)
  2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[[28]](#footnote-28)
  3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.[[29]](#footnote-29)
  4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.[[30]](#footnote-30)

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

* 1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
  2. Jaminan kepastian hukum.
  3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
  4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal , bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, aset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

# Metode Penelitian

# Tipe Penelitian

# Dalam penulisan tesis ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.[[31]](#footnote-31)

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.[[32]](#footnote-32)

# Metode Pendekatan

# Yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang- undangan (statuta approach) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.[[33]](#footnote-33)

# Jenis dan Sumber Data

# Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

# Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam: [[34]](#footnote-34)

# Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat Dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

# Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

# Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

# Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

# Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu: Studi Kepustakaan Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku- buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

# 5. Analisis Data

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian sosial sekarang ini semakin meningkat di masyarakat karena temuan-temuan pada studi kualitatif lebih menjawab persoalan sebenarnya. Salah satu [teknik pengolahan data](https://www.dqlab.id/teknik-pengolahan-data-kualitatif-kenali-macamnya) adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi atau trend untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk atau kebutuhan customer. Contoh data kualitatif adalah data hasil wawancara, catatan riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, data komentar customer terhadap suatu produk, dan data lainnya yang tersajikan dalam tulisan.

# BAB II

# PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

# Definisi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

# Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

# Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok teridi dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

# Pemidanaan seyogyanya memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersumber dari filsafat pemidanaan, yang dijelaskan lebih detail di dalam berbagai teori tujuan pemidanaan. Pidana yang dijatuhkan idealnya harus sesuai dengan tujuan pemidanaan, sehingga dampak positif yang diharapkan dari pemidanaan itu dapat tercapai.[[35]](#footnote-35).

30

# Pada pengadilan anak berbeda dengan pengadilan biasa, dalam pengadilan anak sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dalam pengadilan anak saat ini berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

# Peraturan Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Sanksi Pidana adalah jenis sanksi yang sering digunakan dan dijatuhkan oleh hakim terhadap perbuatan pidana bukan saja pelakunya orang dewasa tapi juga dapat dijatuhkan pada anak yang terpidana. Pidana bagi anak tentu berbeda pada pidana jika pelaku kejahatan itu dilakukan oleh orang dewasa. Sekalipun terdapat perbedaan tapi itu bukan pada bentuk pidananya melainkan pada tujuan dan ringannya yang di jatuhkannya.

Pidana sendiri adalah bentuk sanksi yang sangat di hindari oleh pelaku kejahatan lebih-lebih jika pidana tersebut berupa hukuman mati, hal ini disebabkan karena pidana ini bukan hanya membuat tidak nyaman tetapi dikarenakan adanya perampasan nyawa atas pemenuhan kewajiban yang dijatuhkan negara melalui pengadilan. Sudarto mengemukakan bahwa pidana sebagai derita dengan sengaja diberikan ke orang dengan syarat tertentu karena salah. Pidana diberikan jika orang itu melanggar dengan sengaja ketentuan UU.[[36]](#footnote-36)

Pada pasal 1 poin 6 UU No. 11 Tahun 2012 di dalamnya adil restoratif menjadi solusi pidana yang pelakunya, korbannya, keluarganya, atau lainnya agar bersama menyelesaikan dengan adil serta bukan pembalasan Teori keadilan restoratif ini memiliki peran dan menentukan dalam bekerjanya sistem peradilan anak, prinsip utama menyelesaikan ini dengan metode restoratif justice sebagai penyelesaian dengan pendekatannya mampu menggugah dan sampai hati serta fikiran pihak terkait proses menyelesaikan guna pemahaman makna serta tujuan dalam suatu proses pemulihan serta tindakan. Konsep restoratif justice dikenalkan Braithwaite tahun 1980-an, sebagai pendekatan hukuman, Konsep ini dari penduduk maori saat menyelesaikan penyimpangan dilingkungannya dengan meberikan tekanan pada penyelesaian kasus dengan pelibatan masyarakat serta petinggi agar kasus selesai.

Dakwaan yang digunakan untuk menerapkan sanksi terhadap terdakwa anak yaitu dakwaan kesatu sebagai dakwaan alternatif. Sanksi yang diberikan kepada anak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Analisa penyusun terdakwa anak telah melakukan tindak pidana berat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika mengacu pada Pasal 69 ayat (1) dan (2): (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini; (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belasa) tahun hanya dapat dikenakan tahanan.

Pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak Masih ada proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna shabu atau memang hanya korban penyalahgunaan shabu.

Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, jika ternyata ia terbukti sebagai penyalahguna narkotika, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (namun ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa) sebagaimana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I ini terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi : (1) Setiap Penyalah Guna:

* + 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
    2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
    3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

* 1. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  2. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  3. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

# Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

# Anak merupakan tunas bagi bangsa generasi muda sebagai penerus cita–cita perjuangan bangsa yang memiliki potensi, ciri, sifat, khusus, dan peran strategis yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.[[37]](#footnote-37)

# J.E. Sahetapi, bahwa anak dibawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

# Belum berumur 16 (enam belas) tahun.

# Belum kawin, apabilah telah kawin sebelum unur 16 (enam belas) tahun berarti ia telah dewasa dan jika perkawinannnya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali semula tetapi dianggap tetap dewasa.

# Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya.[[38]](#footnote-38)

# Dalam Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dengan penjelasan sebagai berikut :

# Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

# Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

# Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

# Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang biasa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembanagan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam tiga fase, yaitu :

# Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang biasa disebut sebagai anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi–fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak–anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

# Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak – kanak, dimana digolongkan kedalam dua periode yaitu masa anak sekolah mulai dari usia 7 sampai 14 tahun adalah periode intelektual dan masa remaja/ pra–pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.

# Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.[[39]](#footnote-39)

# Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang–undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[[40]](#footnote-40)

# Analisis Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

# Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effectvie yang berarti berhasil atau sesuatu yang dapat dilakukan dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefnisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.[[41]](#footnote-41)

# Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang tepat ditentukan di dalam organisasi, baik kegiatan atau pun program. Hal tersebut disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.[[42]](#footnote-42)

# Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegakan hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan.[[43]](#footnote-43)

# Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

# Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

# Perlakuan atas anak secara menusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

# Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

# Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

# Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

# Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.

# Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

# Diversi pada tahap penyidikan

# Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undangundang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

# Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

# Diversi pada tahap penuntutan

# Sebagaimana prinsip Welfare Approach (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

# Diversi pada tahap pemeriksaan pengadilan

# Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversi melalui pendekatan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.[[44]](#footnote-44)

# Penerapan diversi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah ultimum remedium dan bukan primum remedium, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.[[45]](#footnote-45)

# Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik baik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satusatunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.[[46]](#footnote-46)

# Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak menyalahgunakan narkotika lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

# Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative, untuk tercapainya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal inianak yang menjadi kurir narkotika. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika hakim sering kali memberikan sanksi dibawah setengah dari maksimum ancaman sanksi orang dewasa.

# Salah satu contoh kasus adalah Putusan Pengadilan Negeri Rantau prapat Nomor 435/Pid.B/2014/PN Rap. Berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan, terdakwa adalah anak berusia 17 tahun yang kedapatan menghisap sabu-sabu dari sebuah bong Sabu yang diletakkan di atas meja di dekat TV. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dan tanpa hak menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Putsan hakim No. 435/Pid.B/2014/PN Rap memberikan sanksi pidana selama 8 bulan penjara kepada tersangka yang masih berumur 17 tahun dianggap benar. Hal ini dikarenakn ancaman sanksi penyalahgunaan narkotika diatas 7 tahun pidana penjara tidak bisa mendapatkan diversi.

# Melihat pasal Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi setengah dari sanksi maksimal. Oleh karena itu menurut penulis penerapan hukuman terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih sesuai dengan ketentuan uu no. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak dan uu no. 03 tahun 1997, tentang sistem peradilan pidana anak.

# BAB III

# FAKTOR PENYEBAB ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012

# Faktor Lingkungan dan Sosial Ekonomi

# Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, sehingga dalam kehidupannya tidak mungkin dapat melepaskan diri atau menghindarkan diri dari pergaulan masyarakat disekelilingnya. Pergaulan dalam lingkungan sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dalam pergaulan. Akibat dari pergaulan tersebut, dengan sendirinya manusia akan akrab dengan lingkungan yang ada disekitarnya.

# *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health*. Mengemukakan bahwa: Penggunaan obat-obatan terlarang terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sementara penyalahgunaan dan ketergantungan dipengaruhi terutama oleh faktor genetik, faktor lingkungan seperti sekelompok teman bercampur dengan mempengaruhi probabilitas orang yang mengambil obat-obatan. Pengaruh teman sepermainan memang cukup besar dalam pergaulan seseorang. Pengaruh dari teman sepermainan tidak selamanya baik, disamping pengaruh positif yang membawa kebaikan bagi perkembangan pribadi dan watak seseorang juga membawa pengaruh negatif yang dapat menghancurkan moral dan wataknya sehingga sering terjadi seseorang terpaksa melakukan tindakan yang kurang baik karena adanya hasutan dari teman-temannya.

# Salah satu penyebab utama mereka terjerumus dalam kejahatan narkotika yaitu disebabkan oleh faktor lingkungan.

45

# Lingkungan pergaulan yang buruk menyebabkan mereka terpengaruh untuk menggunakan narkotika. Lingkungan pergaulan yang buruk secara tidak langsung akan mengajarkan pelaku untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sehingga pelaku akan mudah untuk menkonsumsi narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang disebabkan oleh faktor lingkungan yaitu para pelaku awalnya menggunakan narkotika karena pengaruh teman disekelilingnya. Berawal dari kumpul dengan teman sepermainan kemudian mencoba membeli narkotika untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Namun ada juga yang membeli narkotika untuk dikonsumsi sendiri.

# Salah satu jenis narkotika yang sering digunakan ini adalah narkotika golongan I jenis shabu. Narkotika jenis shabu tersebut merupakan jenis narkotika yang paling banyak beredar di Indonesia dan mudah didapatkan oleh para pelaku. Efek dari penggunaan shabu tersebut apabila dikonsumsi dapat membuat stamina pelaku menjadi lebih fit, merasa bersemangat karena kekuatan fisik meningkat sehingga kemampuan bekerja juga meningkat. Efek itulah yang akhirnya menyebabkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terus menkonsumsi shabu tersebut sampai menyebabkan kecanduan pada diri pelaku tersebut.

# Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh, jika seseorang tidak dapat membentengi dirinya dengan iman yang kuat, maka ia akan mudah terbujuk maupun terjerumus ke dalam kejahatan narkoba. Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi penyebab kejahatan yang disebabkan karena faktor lingkungan maka sesuai dengan teori habitual criminal yang dikemukakan oleh Enrico Ferri yang mana menurut teori ini “seseorang dapat melakukan kejahatan dikarenakan memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial”.

# Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada kategori ini disebabkan karena faktor lingkungan. Para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut sudah biasa menggunakan narkotika karena pengaruh lingkungan sosial disekitarnya yang menyebabkan para pelaku terjerumus ke dalam kejahatan narkotika. Jika seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut juga akan memiliki kepribadian yang baik, namun jika seseorang berada di lingkungan yang tidak baik, maka orang tersebut juga dapat terpengaruh menjadi pribadi yang tidak baik. Sehingga lingkungan yang tidak baik merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

# Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Pada keadaan ekonomi yang baik dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah, demikian pula sebaliknya apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit sehingga banyak orang akan berusaha keluar dari himpitan ekonomi dengan melakukan berbagai cara.

# Kesulitan ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Namun dalam hal ini anak akan cenderung bergerak sebagai pengedar untuk menambah penghasilannya. Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan tehnologi canggih, termasuk pengamatan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang- Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

# Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

# Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

# Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika.

# Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

# Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika.

# Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika.

# Sebagai mahluk sosial dengan sendirinya seseorang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga proses pertumbuhannya dengan sendirinya turut pula dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang banyak menyediakan sarana yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Kurangnya fungsi kontrol masyarakatakan pengaruh budaya dari luar memberi dampak kepada seseorang untuk melakukan pergaulan yang semakin bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

# Dengan tidak adanya rasa keharmonisan dalam lingkungan masyarakat dapat membawa dampat negatif seperti penyalahgunaan narkotika. Lingkungan masyarakat yang tidak kundusif menyebabkan seseorang untuk menyalahgunakan narkotika, hal ini disebabkan oleh rendahnya kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.

# Faktor Keluarga dan Pendidikan

# Keluarga merupakan dasar pondasi pertama dari diri seseorang yang memegang peranan penting terhadap terbentuknya pribadi seseorang. Keluarga juga mempunyai fungsi sebagai pembentuk karakter seorang anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama seorang anak tumbuh dan berkembang serta memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya. Disamping itu, pola tingkah laku orang tua mempengaruhi terhadap diri anak, sehingga keterbukaan antara orang tua dengan anak merupakan faktor yang penting dalam keluarga. Banyak pengguna narkoba yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Salah satu faktor penyebab pelaku menggunakan narkotika karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua. Kedua orang tua yang sudah bercerai sejak seseorang itu masih kecil. Anak tersebut menjadi tertekan karena merasa tidak meliliki keluarga secara utuh sehingga menyebabkan Anak menjadi frustasi dan mulai mengenal obat-obatan terlarang untuk menghilangkan masalah yang dihadapinya.

# Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustasi, sehingga terjebak memilih narkoba sebagai solusi, biasanya yang paling rentan terhadap stres adalah anak, kemudian suami, dan istri sebagai benteng terakhir. Komunikasi yang buruk antara ayah, ibu, dan anak seringkali menciptakan konflik yang tidak berkesudahan. Solusi semua konflik adalah komunikasi yang baik, penuh pengertian, saling menghargai dan menyayangi, serta ingin saling membahagiakan.[[47]](#footnote-47)

# Pada saat seseorang mengalami problem kehidupan yang mengakibatkan dirinya mengalami stres karena tidak menemukan jalan keluar dan tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalahnya, maka orang tersebut akan mudah terpengaruh dengan menggunakan narkotika. Faktor keluarga dapat memicu terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia karena kurangnya pengawasan dari orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya. Hal tersebut akan memudahkann akses penyalahgunaan narkotika. Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi, faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang disebabkan oleh faktor keluarga.

# Penjahat pada kategori ini merupakan penjahat yang melakukan kejahatan karena memiliki masalah keluarga yang berkepanjangan, sehingga pelaku merasa frustasi dan melakukan suatu kejahatan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat terjadi salah satunya disebabkan karena faktor keluarga. Banyak dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang merasa frustasi akibat masalah keluarga yang dialaminya.

# Para pelaku merasa mendapat kenyamanan di luar rumah dengan teman-temannya sesama pengguna narkotika, sehingga pelaku menjadikan narkotika sebagai bentuk pelarian dari masalah keluarga yang dialaminya dan telah menjadi bagian dari gaya hidup atau perilaku. Pelaku tidak memiliki pondasi iman yang kuat untuk menghadapi segala permasalahan keluarga yang dialaminya, serta kurangnya rasa kepedulian antar anggota keluarga. Sehingga untuk melupakan dan menghilangkan segala permasalahan yang dihadapinya menyebabkan pelaku menjadi terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

# Adanya kesempatan karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing mungkin juga karena kurangnya kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home. Sarana dan prasarana karena orangtua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan salah satu pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan.[[48]](#footnote-48)

# Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap Anak melakukan Tindak Kriminal, sebagaimana tabel di atas pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang berpendidikan rendah mencapai 12 orang atau 60% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 5 orang atau 25% dan yang berpendidikan SMU sebanyak 3 orang atau 15%.

# Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya Anak melakukan Tindak Kriminal. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang terjadi di kota Medan pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

# Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut salah satu petugas lapangan Lembaga Permasyarakatan Medan bagian pembinaan mengatakan bahwa sebagian besar pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang ada dalam lembaga permasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah).

# Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal.

# Dengan melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif nya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan masyarakat dan lainnya untuk itu mulai dari sekarang kita galakkan gerakan perangi narkoba, dan pendekatan preventif maupun represif, sehingga upaya penanggulangan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif. Pendidikan merupakan salah satu pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Karena remaja merupakan objek yang secara emosional masih labil, sehingga sangat rentan untuk menggunakan narkoba. Mulai dari rasa ingin tahu, mau cobacoba, ikut-ikutan teman, rasa solidaritas grup yang kuat dan memilih lingkungan yang salah sampai dengan faktor keluarga yang kurang perhatian dan lain sebagainya.

# Faktor Pergaulan dan Pemahaman Tentang Agama

# Semua orang tentu akan merasa sangat senang apabila memiliki banyak teman, akan tetapi apabila seseorang bergaul dengan teman yang salah, dalam hal ini artinya bergaul sembarangan dengan masuk kedalam pergaulan yang salah seperti bergaul dengan teman yang mengkonsumsi narkotika maka hal tersebut tentu akan berdampak fatal. Terlebih lagi apabila seseorang tersebut mempunyai kepribadian dan mental yang lemah pasti seseorang tersebut dapat dengan mudah ikut terjerumus mengkonsumsi narkotika. Dalam ini hal teman sebaya mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi terjerumusnya seseorang kedalam penyalahgunaan narkotika.

# Berawal dari rasa ingin tahu dan ikut-ikutan teman sebaya yang mengkonsumsi narkotika maka seseorang tersebut ikut mengkonsumsi narkotika. Kejadian tersebut biasanya terjadi pada usia remaja dimana rasa ikut-ikutan terhadap teman sangat tinggi. Mereka terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika karena faktor pergaulan yang tidak sehat. Mereka tidak dapat menolak ajakan teman-temannya untuk tidak mengkonsumsi barang haram tersebut dikarenakan mereka tidak mempunyai benteng diri yang kuat untuk menolak ajakan tersebut.

# Selain itu Mardani mengemukakan bahwa narkotika adalah “zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh terhadap tubuh tesebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau kahayalan-khayalan”. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis yang betujuan untuk dimanfaatkan bagi penbobatan dan kepentingan manusia. Seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.[[49]](#footnote-49) Kurang nya dukungan baik dari lingkungan rumah, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah menyebabkan banyak terjadinya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh generasi muda yang seharusnya tidak pantas untuk dilakukan.

# Lingkungan pergaulan sangat berpengaruh untuk membentuk bagaimana jati diri seorang anak. Semakin maju zaman maka akan semakin banyak cara untuk melakukan kejahatan apalagi hidup dan bergaul di lingkungan yang tidak baik untuk di tinggali.

# Pergaulan generasi zaman sekarang yang bisa dibilang sangat banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, atau hal-hal yang menyimpang yang menjerumus pada kejahatan. Bukan hanya kejahatan tetapi dapat merusak tubuh dan fikiran merek. Tetapi karena

# Agama merupakan sumber nilai bagi kehidupan. nilai-nilai yang terkandung dalam agama dipandang baik oleh orang yang yakin dan beriaman terhadap agama. konsekuensi keimanan melahirkan sikap tanduk dan patuh terhadap perintah dan larangan agama. sikap tunduk dan patuh merupakan konsekuensi kesadaran atas keyakinan bahwa setiap yang diperintahkan agama adalah kebaikan dan setiap yang dilarang agama adalah keburukan. Namun, berbeda dengan manusia yang memiliki pemahaman yang rendah dan keyakinan yang rendah terhadap agama.

# Rendahnya pemahaman manusia terhadap agama menimbulkan sikap-sikap manusia yang cendrung melawan perintah dan larangan agama. salah satu yang terjadi adalah masih banyaknya manusia beragama yang terjebak dalam kejahatan narkoba. padahal agama sangat melarang perbuatan yang merugikan dan merusak diri sendiri.

# Agama menjadi landasan untuk kita bisa mengarahkan diri kita untuk memilih jalan yang benar atau salah. Tidak hanya itu agama juga banyak mengajarkan mengenai bagaimana menjaga hubungan antar manusia. Karena banyak generasi zaman sekarang kurang nya pendidikan atau pengetahuan mengenai agamanya maka kehidupannya menjadi tidak terarah. Tidak bisa membedakan hal baik dan buruk, dan mana yang dilarang atau tidak di dalam agama. Hal ini berhubungan dengan didikan oleh orang tua yang membiasakan anaknya hidup berselaras dengan pengetahuan agama yang di percayainya. Pengetahuan agama ini menjadi faktor penting selain keluarga.

# Generasi zaman sekarang yang biasa disebut generasi milenial kebanyakan hanya faham atau mengerti mengenai pentingnya pendidikan dasar dunia tanpa memperhatikan pendidikan agama. Dan disekolah-sekolah sekarang pun butuh memperhatikan bagaimana pentingnya pendidikan agama untuk mendidik generasi kita bukan hanya pintar dalam ilmu umum tetapi menyeimbangkannya dengan ilmu agama.

# Faktor Perkembangan Psikologis, Ketersediaan dan Rasa Ingin Tahu

# Perasaan rendah diri didalam pergaulan di masyarakat ataupun lingkungan sekolah, kerja, mereka menyalahgunakan narkotika, psytropika maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan tersebut. Sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani. Emosional dan mental pada masa masa ini biasanya. Mereka ingin lepas dari segala macam aturan-aturan dari orang tua, dan akhirnya tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotika, psitropika, dan minuman keras lainnya.

# Pertanggung jawaban pidana terbagi atas kesalahan yang terdapat dalam pasal 38, 39, dan yang selanjutnya kesengajaan dan kealpaan yang terdapat dalam pasal 40, dan selanjutnya kemampuan bertanggung jawab terdapat pada pasal 41, 42, dan selanjutnya terakhir alas an pemaaf yang terdapat dalam pasal 43dampai dengan pasal 48.[[50]](#footnote-50)

# Tanggung jawab merupakan kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya respondeoergo sum (aku bertanggung jawab, jadi akua ada). Demikian tegas Emmanuel Levinas. Adapun uraian sebagai berikut kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berprilaku. Oleh karena itu, manusia wajib bertnggung jawab atas pilihan yang telah dibuatnya. Pertimbangan moral, baru akan mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya.[[51]](#footnote-51)

# Kepastian hukum penerapan hukum secara konsisten dan konsekuen dengan norma-norma hukum pidana baik materil maupun formil oleh apparat penegak hukum terutama dalam menginterpretasikan hukum harus selalu menggunakan rasional yang masuk akal dan normalnormal moral yang bersumberkan pada hukum alam dan hukum tuhan. [[52]](#footnote-52)

# Suatu kepribadian yang dimiliki oleh seseorang sangatlah berpengaruh terhadap tingkah laku kehidupannya. Apabila sesorang tersebut memiliki kepribadian yang baik tentunya seseorang tersebut tidak akan mudah terpengaruh hal-hal buruk maka sesorang tersebut tentu tidak akan mudah terjerumus kedalam suatu hal yang tidak baik begitu pun sebaliknya apabila kepribadiaan seseorang kurang baik, labil maka seseorang tersebut dapat dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif seperti penyalahgunaan narkotika.

# Dasar pembentuk suatu kepribadian seseorang dapat dilihat berdasarkan pemahaman agama dan keyakinannya. Semakin seseorang taat beribadah maka semakin tinggi tingkat keimanan seseorang tersebut, maka seseorang tersebut tidak akan mudah terjerumus kedalam hal-hal yang bersifat negatif. Kepribadian seseorang yang kuat merupakan pencegahan awal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika.

# Rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang dimiliki seseorang merupakan dasar setiap orang terutama generasi muda untuk mencoba suatu hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan. Faktor penyalahgunaan narkotika sebagian besar diawali oleh rasa ingin tahu masyarakat terhadap sensasi yang dirasakan apabila mengkonsumsi barang haram tersebut. Masyarakat menganggap mengkonsumsi narkotika merupakan suatu hal baru yang belum pernah mereka rasakan sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mencobanya dan pada akhirnya mereka merasakan ketagihan untuk terus menerus mengkonsumsi barang haram tersebut sehingga menjadi pemakai tetap narkotika.

# Pelaku kejahatan dengan motif ini biasanya dilakukan bagi pengguna pemula atau pada usia anak-anak atau remaja. Dengan rasa keingintahuan yang tinggi pada usia anak-anak membuat anak dapat terlibat dalam melakukan tindak pidana.

# Kebanyakan yanng dilakukan generasi muda pada zaman sekarang ini hanya ingin mencoba. Tetapi setelah ia mencoba dia merasakan hal yang sangat luar biasa yang terjadi didalam tubuhnya seperti ia menjadi lebih percaya diri. Hal itulah yang mendorong untuk terus menerus mengkonsumsi barang haram tersebut. Didasari oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mengetahui sensasi dari barang haram tersebut dan tidak berniat untuk menjadi pengguna tetap narkotika dan bahkan mengengedarkan barang haram tersebut. Setelah merasakannya mereka akan ketagihan dan tidak akan berfikir panjang untuk mendapatkan barang haram tersebut yang menyebabkan banyak terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan.

# Masyarakat yang sudah merasa ketergantungan dengan narkotika pasti akan selalu berusaha untuk mendapatkan barang haram tersebut dengan cara apapun. Peredaran narkotika yang lancar di Kota Medan membuat para penggunanya semakin mudah untuk mendapatkan narkotika, sehingga para pengguna narkotika akan terus menerus mengkonsumsi barang haram tersebut demi mengobati rasa ketergantungannya.

# Berbeda halnya apabila peredaran narkotika itu sulit maka masyarakat yang sudah ketergantungan dengan narkotika pasti akan susah mendapatkan barang haram tersebut. Dampaknya para pengguna narkotika tersebut akan mencari kegiatan lain yang dapat melupakan rasa ketergantungannya terhadap narkotika.

# Maka dari itu masyarakat yang telah ketergantungan dengan narkotika akan sedikit demi sedikit berhenti menggunkan narkotika tersebut karena sulit mendapatkannya. Mereka mendapatkan sabu-sabu di Indonesia sangatlah mudah, sehingga mereka dapat terus menerus menggunakan barang haram tersebut.

# BAB IV

# UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

# Pendidikan dan Sensitisasi Terhadap Anak

# Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia dianggap sebagai kawasan rawan narkotika, termasuk Medan. Dilihat dari banyak nya kasus yang ada dimedan ditetapkan sebagai kawasan rawan narkotika. Tentu saja berbagai elemen masyarakat di wilayah tersebut memerlukan kewaspadaan dari dampak penyalahgunaan barang haram tersebut. Termasuk di dalamnya, siswa Sekolah Menengah Atas. sebagai satu bagian dari masyarakat tersebut berada dalam lingkungan masyarakat yang rawan narkotika.

# Untuk menetapkan kawasan rawan penyalahgunaan narkotika, BNN membuat beberapa indikator tertentu. Secara umum, indikator-indikator dimaksud dibagi kepada dua jenis, yaitu indikator pokok dan indikator pendukung. Delapan indikator pokok yang telah disebutkan, jika ditemukan pada suatu wilayah maka wilayah tersebut akan tetapkan sebagai kawasan rawan narkotika. Sebagai contoh, jika wilayah A misalnya, terdapat indikator:

# Kasus kejahatan narkoba,

# Ada bandar,

# Pengguna narkoba,

# Barang bukti,

# Entri poin narkoba, serta

61

# Kurir narkoba, maka wilayah A dijadikan sebagai kawasan rawan narkoba.

# Enam elemen yang disebutkan pada wilayah A, menunjukkan daerah tersebut mempunyai berbagai kegiatan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, dapat dikatakan berbagai wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan narkoba oleh BNN, menunjukkan penyelahgunaan narkotika di sana sudah sangat mengkhawatirkan. Tentu saja gejala itu akan merembet ke lembaga sekolah, termasuk SMA.

# Selanjutnya, berkaitan dengan gejala penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan terdapat lebih dari 1,2 juta jiwa pengguna narkoba yang masih berusia pelajar (12-21 tahun). Usia tersebut menunjukkan bahwa siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masih kelas 1 sudah mulai melakukan penyalahgunaan narkotika. Dan pada umumnya, siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dominan menyalahgukan narkotika. Fenomena tersebut sungguh disayangkan, karena generasi penerus bangsa ini sudah mengalami kerusakan moralitasnya.

# Patut diketahui bahwa sebagian besar pengunaan/konsumsi narkotika dimulai saat mereka masih remaja (usia sekolah) dengan merokok dan minuman keras. Mereka melakukan hal tersebut untuk mengurangi ketegangan dan frustasi, meringankan kebosanan dan keletihan. Di sisi lain, dengan menkonsumsi narkotika akan memberikan perasaan nikmat melalui ketenangan, kegembiraan atau meningkatnya sensasi dalam waktu yang panjang.

# Edukasi masalah narkoba perlu ditanamkan sejak dini agar generasi bangsa ini memiliki pemahaman yang kuat terhadap persoalan narkoba sehingga pada akhirnya mereka memiliki imunitas untuk menangkal ancaman narkoba. Terkait edukasi tersebut tentang pentingnya penerapan kurikulum anti narkoba yang terintegrasi dari mulai tingkat TK hingga SMA atau sederajatnya. Saat ini penerapan kurikulum memang belum bisa dilaksanakan secara nasional. Meski demikian sejumlah daerah sudah memiliki komitmen yang nyata dengan menerapkan kurikulum anti narkoba di sekolah seperti di Sumatera Utara. Hal ini bisa terealisir karena memang ada dukungan dari DPRDnya. Hal itu ditandai dengan munculnya Perda ataupun Pergub untuk menguatkan langkah tersebut saat membuka kegiatan Rapat Kerja Pengembangan Kapasitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

# Generasi muda memang sangat beralasan, karena jika tidak ada upaya serius penanggulangan narkoba sejak dini maka anak-anak bangsa yang akan memimpin roda kepemimpinan di masa depan berpotensi untuk terkontaminasi narkoba. Terlebih saat ini persentase angka penyalahgunaan narkoba tertinggi itu ada di level generasi muda. Sehingga mutlak upaya penyelamatan generasi bangsa harus dilakukan dengan sangat serius. Narkoba merupakan salah satu cara penghancuran generasi bangsa ini. Salah satu strategi yang bisa diterapkan di lingkungan pendidikan adalah dengan upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urine. Namun ada juga hal penting yang tak boleh dikesampingkan yaitu tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa pada generasi muda sehingga mereka memiliki karakter yang kuat.

# Fenomena penyalahgunaan narkotika seperti telah diuraikan kiranya perlu penanganan yang intensif dan komprehensif, khususnya bagi pelajar sekolah. Dalam hal ini, diperlukan usaha maksimal yang harus dilakukan oleh berbagai pihak untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan mereka. Artinya, diperlukan ide-ide yang logis untuk diformulasikan pola pencegahan penyalahgunaan narkotika di berbagai sekolah di kota Medan.

# Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan, khususnya teman-teman sekitar. Hal ini tentu saja diperlukan kewaspadaan dari orang tua dan dewan guru di sekolah. Artinya, selama di rumah orang tua wajib membimbing dan mengontrol lingkungan pergaulan anaknya dari teman yang tidak baik. Sementara guru sekolah, harus mendeteksi secara ketat siswanya dari gejala-gejala penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah.[[53]](#footnote-53)

Ada juga beberapa metode treatment yang berbeda, beberapa di

antaranya mengundang kontroversi jika digunakan bagi remaja. Contoh dari

jenis perawatan ini meliputi (1) sensitisasi rahasia, di mana pelaku belajar

untuk mengasosiasikan respon negatif terhadap seksual, menarik situasi yang

dianggap menyimpang, sensitisasi rahasia dibantu, di mana stimulus tidak

menyenangkan, seperti bau yang tidak menyenangkan, digunakan untuk

membuat reaksi negati

Ada juga beberapa metode treatment yang berbeda, beberapa di

antaranya mengundang kontroversi jika digunakan bagi remaja. Contoh dari

jenis perawatan ini meliputi (1) sensitisasi rahasia, di mana pelaku belajar

untuk mengasosiasikan respon negatif terhadap seksual, menarik situasi yang

dianggap menyimpang, sensitisasi rahasia dibantu, di mana stimulus tidak

menyenangkan, seperti bau yang tidak menyenangkan, digunakan untuk

membuat reaksi negati

# Ada juga metode treatment yang berbeda, beberapa di antaranya mengundang kontroversi jika digunakan bagi remaja. Contoh dari jenis perawatan ini yaitu sensitisasi, di mana pelaku belajar untuk mengasosiasikan respon negatif terhadap narkotika, menarik situasi yang dianggap menyimpang, sensitisasi rahasia dibantu, di mana stimulus tidak menyenangkan, seperti perasaan yang tidak menyenangkan, digunakan untuk membuat reaksi negatif. Sensitisasi adalah proses di mana suatu organisme menjadi lebih responsif terhadap aspek tertentu dari lingkungannya.

Ada juga beberapa metode treatment yang berbeda, beberapa di

antaranya mengundang kontroversi jika digunakan bagi remaja. Contoh dari

jenis perawatan ini meliputi (1) sensitisasi rahasia, di mana pelaku belajar

untuk mengasosiasikan respon negatif terhadap seksual, menarik situasi yang

dianggap menyimpang, sensitisasi rahasia dibantu, di mana stimulus tidak

menyenangkan, seperti bau yang tidak menyenangkan, digunakan untuk

membuat reaksi negati

# Perlindungan dan Rehabilitasi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

# Permasalahan penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Seperti yang diketahui, narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaaan. Selain itu, yang menjadi pelaku penyalahgunaan pengedaran narkoba tidak hanya dari kalangan dewasa tetapi juga didominasi oleh anak-anak atau generasi muda.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun, ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHP. Mengingat anak memiliki kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, untuk itu perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

Jangan sampai peribahasa yang mengungkapkan sudah jatuh tertimpa tangga, menggambarkan nasib anak-anak yang dipenjarakan, lalu tidak memiliki masa depan setelahnya. Hal ini seperti dikeluarkan dari sekolah yang menimpa remaja RJ yang berusia 16 tahun yang menghina Presiden Joko Widodo, kasus ZL remaja 17 tahun yang membunuh begal atau seperti kasus remaja X yang menjadi korban kurir narkotika.

Undang-Undang No.3 Tahun Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan ketentuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana anak usia hingga 18 tahun diperlukan tata cara pengadilan sendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa.

Pembedaan ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan psikis bagi anak-anak yang memiliki masa depan yang masih panjang. Sehingga terhindar dari anggapan anak yang menganggap kasus dirinya sama menyeramkannya dengan kasus pidana orang dewasa.

Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tersebut, dapat dikatakan bahwa perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memiliki ketentuan; setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orangtuanya tetap dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Selanjutnya, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Terakhir, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan keutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Selain adanya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, narapidana anak harus mendapat pemenuhan hak narapidana anak, yaitu hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, hak pendidikan, hak makan dan minum dan hak tempat tinggal.

Narapidana anak juga perlu mendapatkan pembinaan sosial untuk mengembangkan pribadi dan hidup masyarakanya. Aktivitas yang bisa dilakukan oleh narapidana anak adalah dengan memfasilitasinya bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban untuk memelihara hubungan batin.

Dengan mendapatkan berbagai pembinaan berdasarkan perlindungan narapidana anak, maka narapidana anak diharapkan bisa menentukan dan mendapatkan kembali jati diri alamiahnya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik.

Dalam UUSPPA yang dimaksud dngan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan perwujudan dari keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga. Pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Kebijakan formulasi tentang diversi ini banyak dilandasi undang-undang terkait sebelumnya, yaitu Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Konsep diversi senada dengan kehendak Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan wajar.
2. Orang tua yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
4. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.[[54]](#footnote-54)

Konsep diversi juga senada dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya atau pihak lainnya yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk perkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini tampak bahwa perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ditentukan sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.
3. Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
4. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
5. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Prinsip-prinsip tersebut tampak selaras dengan tujuan dan bentuk diversi sebagaimana diatur dalam UUSPPA. Konsep diversi juga terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, yaitu pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam bentuk:

* 1. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak.
  2. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
  3. penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
  5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
  6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
  7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial.

Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak ½ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.

Perlu diketahui, penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang mengaturnya. Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penaganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Kemudian Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Seluruh peraturan tersebut melalui proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan. Dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

# Pengembangan Program Prevensi Tindak Pidana Narkotika Bagi Anak

# Narkotika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan Narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam, menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melalui situs websitenya dijelaskan bahwa ada 7 (tujuh) dampak dari Penyalahgunaan Narkotika, yaitu:

# Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik,

# Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap keluarga,

# Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap sekolah atau pendidikan,

# Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis,

# Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan sosial,

# Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat, bangsa dan Negara,

# Dampak dalam penyalahgunaan narkotika terhadap kondisi spiritual.

# Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik yaitu gangguan pada sistem syaraf (neurologis), seperti kejang-kejang, halusinasi, ganggu kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), seperti inveksi akut otot jantung, ganggu peredaran darah, gangguan pada kulit (dermatologis) seperti penanahan (apses), alergi, eksim, gangguan pada paruparu (pulmoner), seperti penekanan fungsi pernafasan, kesulitan bernafas, penggeseran jaringan paru-paru, sering sakit kepala, mualmual dan muntah, suhu tubuh meningkat, sulit tidur, dampak penyalahgunaan Narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: Penurunan hormone reproduksi (estrogen), progesterone, testosterone, serta gangguan fungsi seksual, dampak penyalahgunaan Narkotika terhadap kesehatan reproduksi kepada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid), bagi pengguna Narkotika melalui jarum suntik, khususnya memakai jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertularnya penyakit seperti hepatitis B, C dan HIV yang hingga saat ini tidak ada obatnya, Penyalahgunaan Narkotika bisa mengakibatkan fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi Narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

# Mencegah adalah upaya agar orang tidak memakai narkotika, agar pemakaian narkotika tidak berlanjut dan tidak menimbulkan dampak buruk.82 Upaya pencegahan anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika belum banyak dilakukan. Hal ini terbukti dari banyaknya penyalahguna narkotika dari kalangan anak. Menyikapi hal ini, diperlukan lebih banyak lagi terobosan baru yang bersifat preventif. Preventif disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkotika agar mengetahui selukbeluk narkotika sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain termasuk lembaga profesional terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perkumpulan, Organisasi Masyarakat (ORMAS), dan lain-lain.

# Terdapat beberapa program yang dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap anak. Pertama, memberikan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkotika terhadap anak melalui sekolah. Contohnya pada kegiatan upacara, atau meminta waktu tertentu misalnya pada Jum’at pagi di pelajaran muatan lokal yang ditujukan untuk memberi peringatan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Pencegahan yang kedua adalah dengan memberikan pemahaman kepada orang tua agar bisa menjaga anaknya, mengontrol kegiatan anak, serta meningkatkan peran orang tua dalam membangun kesadaran bahaya penyalahgunaan narkotika pada anak, contohnya orang tua menjelaskan konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika.

# Orang tua dihimbau untuk memberikan kehangatan dalam rumah tangga dengan membangun komunikasi antara anak dan orang tua seperti mendengar apa isi hati anak. Hal ini sangat diperlukan dikarenakan jika anak sering didengar oleh orang tuanya, maka si anak mempunyai daya tangkal tersendiri sehingga dia tidak butuh lagi perhatian dari orang lain disebabkan dia sudah mendapat perhatian dari orang tuanya. Karena sebenarnya jika kehangatan dalam rumah tangga itu ada dan sudah diperoleh perhatian yang cukup dalam keluarga, maka dia tidak mudah terpengaruh oleh orang lain.

# Oleh karena itu, peran orang tua atau keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini terhadap anak sangat besar. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak, yaitu pertama, mempelajari masalah narkotika. Tidak mungkin kita bisa mencegah, jika tidak tahu apa yang sedang kita coba cegah. Orang tua dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan mempelajari masalah narkotika dengan membaca, mendengarkan ceramah, berdiskusi dan membahas masalah narkotika di majalah, koran atau pada program televisi dan radio.

# Orang tua harus mengerti jenis-jenis narkotika dan bahaya menggunakan narkotika yang nantinya akan disampaikan kepada anak sebagai proses pendidikan tentang narkotika. Hal kedua yaitu mengajarkan anak tentang masalah narkotika. Umumnya anak menerima informasi tentang narkotika dari luar rumah, sebagian besar dari teman sebayanya. Hal ini sangat berbahaya, terutama ketika anak mengetahui suatu hal yang baru secara tidak komprehensif atau setengah-setengah. Dikatakan setengah-setengah karena biasanya anak hanya tahu enaknya saja namun tidak mengerti dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, orang tua perlu mengajarkan narkotika secara detail kepada anak sehingga anak mengerti secara utuh dan mampu mengambil langkah yang benar. Orang tua sebagai pembimbing dan pendidik memiliki beberapa kewajiban yaitu membantu anak mengatasi masalah yang dihadapi, memberikan alternatif penyelesaian masalah, mengarahkan anak dalam menggali potensi diri, menyadarkan anak bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekusor narkotika tidak sesuai dengan nilai, norma yang berlaku dalam agama dan masyarakat, dan yang terakhir memberi pemahaman bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekusor narkotika dapat mengakibatkan putus sekolah, tidak dapat bekerja dengan baik, terlibat tindak pidana, menganggu ketertiban umum, dan terkena berbagai macam penyakit.

# Hal yang ketiga adalah melarang pemakaian narkotika. Melarang anak melakukan pemakaian narkotika jenis apapun, termasuk rokok dan minuman beralkohol, dan ini harus menjadi peraturan keluarga. Orang tua harus bisa menjadi contoh bagi anak agar tidak mengonsumsi hal-hal tersebut. Aturan dibuat atas kesepakatan anggota keluarga. Orang tua harus menjelaskan konsekuensinya apabila aturan dilanggar. Anak harus memahami aturan-aturan tersebut dengan jelas dan spesifik, artinya anak mendapatkan penjelasan mengenai peraturan larangan memakai narkotika, konsekuensinya jika melanggar aturan, bagaimana pelaksanaan hukuman bagi yang melanggarnya, dan tujuan hukuman tersebut. Selain itu, anak juga harus diarahkan agar konsisten dengan peraturan tersebut.

Tahapan membicarakan pencegahan narkoba pada remaja:

1. Menanyakan pandangannya tentang narkoba. Ada baiknya kalian mampu membuat para remaja menyampaikan pandangannya dengan jujur. Kalian juga harus selalu siap mendengarkan perasaan serta pandangan mereka.
2. Sampaikan alasan yang jelas untuk tidak menggunakan narkoba. Pada tahap ini, hindari menakut-takuti mereka. Kalian bisa menegaskannya melalui dampak dari penggunaan narkoba seperti kesehatan, penampilan serta kemampuan mengemudi.
3. Meninjau pesan di akun media sosial. Jangan pernah anggap sepele akun media sosial. Sebab, media sosial, program televisi, lagu hingga film terkadang bisa meremehkan dampak penggunaan narkoba. Untuk itu, kalian harus siap serta meninjau perasaan mereka.
4. Diskusikan cara menolak tekanan dari teman sebaya. Diskusi ini menjadi salah satu hal penting. Sebab, dengan cara ini kalian bisa mengajak para remaja untuk menolak menggunakan narkoba. Sehingga pencegahan narkoba pada remaja bisa membuahkan hasil bagus.

Selain itu, terdapat strategi-strategi dalam pencegahan narkoba pada remaja. Berikut strategi-strategi yang bisa dilakukan:

1. Ketahui aktivitas yang dilakukan oleh para remaja. Perhatikan juga lingkungan tempat beraktivitasnya. Ketahui kegiatan-kegiatan dengan arahan orang dewasa. Sebaiknya dengan orang yang disukai oleh mereka dan dorong untuk mengikuti kegiatan tersebut.
2. Tetapkan aturan serta konsekuensi. Jelaskan para mereka alasan untuk tidak menggunakan narkoba serta tidak bergaul dengan penggunanya. Bila mereka melanggar aturan, berikan konsekuensi yang sudah ditetapkan secara tegak.
3. Ketahui teman-teman para remaja. Hal ini cukup penting dilakukan. Sebab, jika ada teman yang menjadi pengguna maka memungkinkan bagi remaja untuk ikut menggunakannya juga. Terkadang bahkan mereka merasa tertekan untuk mencobanya.
4. Mengawasi selalu resep obat. Selain itu ada baiknya membuat inventaris obat-obatan di rumah.
5. Beri dukungan kuat dari keluarga. Terutama dukungan pada setiap kegiatan positif yang dilakukannya. Agar para remaja bisa terhindar dari bahaya narkoba.
6. Berikan contoh yang baik. Sebagai orang terdekat mereka, sudah sepantasnya kalian memberikan contoh yang baik. Tujuannya agar diharapkan mereka akan meniru sikap baik yang kalian lakukan tersebut.

Apabila mengetahui ada seorang remaja yang menggunakan narkoba, kalian bisa melakukan hal-hal berikut ini sebagai bentuk pencegahan narkoba bagi remaja yaitu:

1. Berbicara kepada remaja tersebut. Perlu digarisbawahi, kalian tidak bisa melakukan intervensi terlalu dini.
2. Dorong para remaja untuk berkata dengan jujur. Pastikan kalian berbicara dengan tenang agar si remaja bisa mengutarakan perasaannya dengan baik pula. Katakan juga bila kalian peduli terhadapnya, meski di satu sisi harus bisa memverifikasi setiap perkataannya.
3. Amati serta fokus pada tingkah lakunya. Bukan terhadap orangnya ya. Tekankan pula jika penggunaan narkoba sangat berbahaya. Namun tetap jangan menilai mereka sebagai orang jahat.
4. Periksa si remaja secara teratur. Pemeriksaan bisa dilakukan dari lingkungan aktivitasnya. Kalian juga bisa mulai mengajak bicara mereka setiap pulang dari sekolah.
5. Datang ke bantuan profesional. Hal ini dilakukan jika si remaja telah menyalahgunakan narkoba dalam jumlah banyak. Kalian bisa segera menghubungi dokter atau penyedia layanan kesehatan untuk membantu mengatasi.

Perlu diperhatikan, tak ada yang namanya ‘terlalu cepat’ dalam upaya pencegahan narkoba pada remaja. Sebab, percakapan serta perkataan kalian kepada para remaja nantinya mampu membantu mereka menjalankan hidup sehat dan lebih bai di masa depan.

# Lingkungan bebas narkotika adalah lingkungan yang bebas dari penggunaan dan peredaran gelap narkotika. Menjadikan lingkungan bebas narkotika merupakan tanggung jawab semua orang, baik dewasa maupun anak anak, baik pemerintah maupun masyarakat. Lingkungan yang dimaksud adalah keluarga, sekolah, tempat kerja, dan tempat umum. Upaya menjadikan lingkungan bebas narkotika meliputi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Upaya itu di Indonesia disebut dengan P4GN (pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan gelap narkoba). Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melakukan tugas ini yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) di pusat dan daerah.

# Beberapa hal dapat dilakukan untuk menjadikan lingkungan bebas narkotika, diantaranya dengan memulai dari diri sendiri, dilanjutkan dengan membantu orang lain dan menjadikan lingkungan terdekat bebas narkotika. Hal yang pertama dilakukan yaitu meningkatkan daya tangkal. Meningkatkan daya tangkal berarti meningkatkan daya tahan seseorang sehingga tidak perlu memakai narkotika. Seseorang tidak cukup hanya mengetahui bahaya narkotika, tetapi perlu mengubah sikap dan pola pikir negatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan.

# Hal yang kedua yaitu dengan tidak merokok atau minum alkohol. Merokok dan minuman alkohol adalah pintu masuk bagi penyalahgunaan narkotika lain seperti ganja, pil penenang/tidur, shabu, dan heroin. Oleh karena itu, langkah yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika adalah mencegah agar tidak merokok dan minum alkohol atau menunda usia merokok dan minum alkohol.

# Selain itu Peran media masa sangat penting, karena dapat menyampaikan pesan-pesan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dilingkungan masyarakat, mayoritas masyarakat mengetahui informasi tentang bahaya Narkotika dari media masa, baik media cetak maupun elektronik. Sebagai sarana informasi dan komunikasi, kedepan media masa harus lebih aktif menyuarakan bahaya penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, media juga mempunyai tugas untuk memberikan pencegahan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mudah terlena dan terjerat sindikat Narkotika. Selama ini mereka yang direkrut para bandar adalah masyarakat yang ragu-ragu dan tidak punya pendirian serta memiliki kepercayaan diri yang rendah. Masyarakat seperti ini diimunisasi, agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika.

# Dalam menyampaikan pesan-pesannya, media masa hendaknya dengan bahasa yang familiar dan komunikatif, agar mudah dipahami masyarakat. Misalnya dalam bentuk cerita pendek, cerita humor dan cerita ringan tentang kejadian sehari-hari. Teknik penyampaian pesan seperti itu melalui media masa, lebih mudah diterima masyarakat.

# Peningkatan Pemantauan dan Enforcement Bagi Anak

# Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan pada Aparat Penegak hukum.

# Menurut data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), anak-anak yang menjalani hukuman penjara atau tahanan tiap tahun berjumlah sekitar 6000 orang anak. Jumlah yang cukup mengkhawatirkan, mengingat karakteristik dan kekhususan yang dimiliki seorang anak, menuntut ia untuk tumbuh kembang di lingkungan yang ramah dan bersahabat, penuh kasih sayang dari orang-orang terdekat. Tentu tempat itu bukanlah dibalik terali besi.

# Dalam ranah dunia anak ini, meskipun telah terdapat suatu pembaharuan dalam bidang hukum, yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun di Indonesia, masih banyak sistem, kebijakan, yang tidak bersahabat dengan karakteristik anak, sehingga berperan menyebabkan persoalan-persoalan yang menjadikan anak sebagai korban, dan berhadapan dengan hukum. Sehingga, perlindungan terhadap anak tidak terjamin dengan baik. Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

# Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.

# Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dinyatakan adanya proses penyelesaian perkara pidana anak yang diwajibkan dilaksanakan sejak tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan serta pengadilan, yaitu Diversi yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan bersifat kekeluargaan dan perdamaian antara semua pihak dari anak yang berhadapan dengan hukum bersama keluarganya atas sangkaan atau dakwaan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (residive), serta proses diversi dilaksanakan dengan merahasiakan identitas dan jati diri anak terperiksa pada media cetak/elektronik, bahkan apabila sesorang melanggar kewajiban merahasiakan identitas atau jati diri anak tersebut justru diancam dipidana penjara 5 tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah, juga terdapat ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda Maksimal dua ratus juta rupiah, terhadap peyidik, penuntut umum dan hakim yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan proses Diversi dalam kasus pidana anak. Selanjutnya dalam hal tindak pidana dlakukan oleh anak yang belum berusia 18 tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas usia 18 tahun tetapi belum mencapai usia 21 tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang peradilan anak.

# Bahwa semua komponen pengadilan negeri dan lembaga sosial kemasyarakatan serta keluarga anak yang berhadapan dengan hukum melibatkan diri secara aktif dalam upaya pembimbingan dan pendampingan sebelum sedang dan sesudah dilaksanakannya suatu tindakan maupun pemidanaan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.

# Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi penerus yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[[55]](#footnote-55)

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan dirinya dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak yang berkonflik dengan hukum seyogyanya mendapat perlindungan hukum, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan:

* 1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam hal ini pemantauan yang ekstra terhadap anak dibutuhkan karena dengan melihat semakin banyaknya kasus yang ada di insonesia tentang penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya cukup dengan memberikan pelajaran atau sosialisasi saja, tetapi dengan pantauan yang lebih kepada anak-anak akan membuatnya lebih berhati-hati untuk melakukan hal yang dilarang atau hal yang tidak baik menurut hukum dan agama.

# Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut.Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupunsecara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak.

# Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

# 1) Diversi pada tahap penyidikan

# Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undangundang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

# Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

# 2) Diversi pada tahap penuntutan

# Sebagaimana prinsip Welfare Approach (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

# 3) Diversi pada tahap pemeriksaan pengadilan

# Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversi melalui pendekatan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.[[56]](#footnote-56)

# Penerapan diversi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah ultimum remedium dan bukan primum remedium, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.[[57]](#footnote-57)

# Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik baik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral.

# Akan tetapi pengadilan bukanlah satusatunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.[[58]](#footnote-58)

# Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta peranannya dalam menciptakan penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia, dan penerapan ketentuan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia bila dikorelasikan dengan bekerjanya hukum di masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak selama ini ternyata telah memberikan suatu efek sosial dalam pelaksanaan hukum di masyarakat. Bila kita cermati perkembangan sosial masyarakat dewasa ini, maka banyak pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan anak tersebut masih belum maksimal, hal ini tercermin dari tingginya tingkat kekerasan pada anak, meningkatnya jumlah perdagangan anak dan lain sebagainya. Pada dasarnya penegakan hukum terhadap perlindungan anak akan terwujud dan ketentuannya akan berlaku efektif apabila substansi hukumnya sesuai dengan budaya masyarakat, mentalitas dan pola perilaku penegak hukum yang baik, serta adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat tersebut.

# BAB V

# PENUTUP

# A. Kesimpulan

1. Menurut Analisa penyusun terdakwa anak telah melakukan tindak pidana berat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika mengacu pada Pasal 69 ayat (1) dan (2): (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini; (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belasa) tahun hanya dapat dikenakan tahanan. Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, jika ternyata ia terbukti sebagai penyalahguna narkotika, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (namun ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa) sebagaimana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.
2. Pergaulan dalam lingkungan sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dalam pergaulan. Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang baik. Keluarga merupakan dasar pondasi pertama dari diri seseorang yang memegang peranan penting terhadap terbentuknya pribadi seseorang. Tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap Anak melakukan Tindak Kriminal atau penyalahgunaan narkotika. Apabila seseorang bergaul dengan teman yang salah, dalam hal ini artinya bergaul sembarangan dengan masuk kedalam pergaulan yang salah seperti bergaul dengan teman yang mengkonsumsi narkotika maka hal tersebut tentu akan berdampak fatal. Rendahnya pemahaman manusia terhadap agama menimbulkan sikap-sikap manusia yang cendrung melawan perintah dan larangan agama. Emosional dan mental pada masa masa ini biasanya, Mereka ingin lepas dari segala macam aturan-aturan dari orang tua, dan akhirnya tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotika, psitropika, dan minuman keras lainnya. Peredaran narkotika yang lancar dilingkungan masyarakat saat ini membuat para penggunanya semakin mudah untuk mendapatkan narkotika. Rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang dimiliki seorang anak merupakan dasar setiap orang terutama generasi muda untuk mencoba suatu hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan.

88

# Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah tindak pidana narkotika terhadap anak telah terlaksana dengan lahirnya Undang-undnag No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Edukasi masalah narkotika perlu ditanamkan sejak dini agar generasi bangsa ini memiliki pemahaman yang kuat terhadap persoalan narkoba sehingga pada akhirnya mereka memiliki imunitas untuk menangkal ancaman narkoba. Terkait edukasi tersebut tentang pentingnya penerapan kurikulum anti narkoba yang terintegrasi dari mulai tingkat TK hingga SMA atau sederajatnya. Saat ini penerapan kurikulum memang belum bisa dilaksanakan secara nasional. Meski demikian sejumlah daerah sudah memiliki komitmen yang nyata dengan menerapkan kurikulum anti narkoba di sekolah seperti di Sumatera Utara. Hal ini bisa terealisir karena memang ada dukungan dari DPRDnya. Hal itu ditandai dengan munculnya Perda ataupun Pergub untuk menguatkan langkah tersebut saat membuka kegiatan Rapat Kerja Pengembangan Kapasitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

# B. Saran

# Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana seharusnya dapat memberi efek jera dalam hal mendidik, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak merusak mental ketika menjalani hukuman yang diberikan. Dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika merupakan korban yang seharusnya mendapat perhatian dan pengobatan sehingga anak tersebut dapat sembuh dan tidak mengulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika.

# Banyak faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, terutama faktor lingkungan sekitar. Hal ini dapat dicegah melalui pengawasan yang lebih ketat oleh orang tua. Dan memberikan pendidikan agama kepada anak tersebut sehingga lebih mengetahui efek dan akibat dari penyalahgunaan narkotika. Orang tua harus dapat melihat bakat atau keinginan yang dimiliki oleh anak, sehingga orang tua dapat mengarahkan bakat dan keinginan anak tersebut.

# Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika melalui upaya preventif yaitu memperkenalkan atau mensosialisasikan sejak dini tentang dampak negatif yang dapat di timbulkan akibat penyalahgunaan narkotika, preemtif yaitu upaya pemerintah dengan membuat iklan melalui semua media baik cetak maupun elektronik tentang bahaya nya narkotika, dan represif yaitu penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dengan cara rehabilitasi atau mengobatinya. Seharusnya pihak kepolisian bersinergi dengan badan narkotika nasional untuk menetapkan anak sebagai korban tindak pidana narkotika untuk mengobati anak tersebut dalam hal merehabilitasi anak tersebut.

# DAFTAR PUSTAKA

**Peraturan**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

**Buku**

Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, Medan, USU Press, 2011

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PTIK, 2016.

Abintoro, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Alamsyah Citra Negara, “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dlakukan oleh Anak*, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.

A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2004.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Cambel, JP, , *Riset Dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta, 1989

Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.

Ediwarman, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan, 2016.

Ediwarman, *Monograf Viktimologi*, Medan, 2017.

E. Fernando M. Manullang, *Legisme. Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2016.

I.H. Hijmans, *dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2006.

JJJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative, Cet III, Bayu media Publishing*, Malang , 2007.

Julianan lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba priskotropika dan gangguan jiwa*, 2015.

Karl O. Christiansen, “*Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy”, Resource Material series No. 7*, UNAFEI, Tokyo, 1974.

Lex Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 1993

Lilik Mulyadi, SH, MH, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015.

Mardani, “*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002),* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muchsin. “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)”. Varia Peradilan Tahun XXVI No. 308 Juli 2011*. Jakarta: IKAHI, 2011.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Muladi dan Nawawi Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998.

Muhammad Erwin, *filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika, 2017.

Mukti Fajar Nurdewata et al, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Nadhira Rizkia Fatha, ”*Resilensi Pada Mantan Pecandu Narkoba*”, (skripsi) Banda Aceh: Fak. Kedokteran Unsyiah, 2018.

Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers,2011.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita, 2008.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba* Jilid 2, PT Tirta Asih Jaya, jakarta, 2015.

Shidarta (ed), Mochtar Kusuma-Atmadja dan *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984.

Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Huku,* UI Press, Jakarta, 1986.

Sondang Siagi, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung Jakarta , 1991.

Steers, M Richard, , *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1985.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.

Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2000.

Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011.

Walahe S. “*Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan*” Lex Crimen ,2013.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, 2008.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta,Sinar Grafika, 2009.

**Jurnal**

Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah, Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia (Jurnal hukum acara perdata JHAPER : Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016),

Laporan pelaksanaan SPPA tahun 2020, jakarta

loysius R. Entah, Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila (Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)

Ramadhan Adi, Ubi Societas Ibi Ius: Ada Masyarakat, Ada Hukum (https://ramadhanadi. wordpress.com/2013/11/29/ubi-societas-ibi-ius-adamasyarakat-ada-hukum/)

**Internet**

https://indonesiabaik.id/motion\_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak

1. Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muchsin. 2011. “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*”. Varia Peradilan Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. Jakarta: IKAHI. hal. 23. [↑](#footnote-ref-2)
3. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, http://epharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf diakses pada tanggal 7 September 2020 jam 15.01 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing. hal. 30. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers,2011), hal 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta*: Djambatan. hal: 5 [↑](#footnote-ref-6)
7. Walahe S. “*Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan*” Lex Crimen 2013;2: hal 43–52. [↑](#footnote-ref-7)
8. https://indonesiabaik.id/motion\_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak [↑](#footnote-ref-8)
9. Laporan pelaksanaan SPPA tahun 2020, jakarta, hal : 2 [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 27. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Huku,* UI Press, Jakarta, 1986, hal.6. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mukti Fajar Nurdewata et al, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 134. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lex Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 1993, Hal. 35. [↑](#footnote-ref-13)
14. JJJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 203 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. hal.01 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muladi dan Nawawi Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), hal 8 [↑](#footnote-ref-16)
17. Karl O. Christiansen, “*Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*”, Resource Material series No. 7, UNAFEI, Tokyo, 1974. hal 26. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sudarto, *PEMIDANAAN PIDANA DAN TINDAKAN*, BPHN Jakarta, hal.4. dalam www.bphn.go.id/. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyara*t, Alumni, Bandung, hal. 60 [↑](#footnote-ref-19)
20. M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. hal. 279 [↑](#footnote-ref-20)
21. R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. hal.1 [↑](#footnote-ref-21)
22. Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hal 25-26 [↑](#footnote-ref-22)
23. Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi* ( Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 10. [↑](#footnote-ref-23)
24. 4 Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), . hal 1343 [↑](#footnote-ref-24)
25. Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* [↑](#footnote-ref-25)
26. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.53. [↑](#footnote-ref-26)
27. Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 121. [↑](#footnote-ref-27)
28. Setiono, “*Rule of Law”,* (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal.3. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 darihttp://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 10. [↑](#footnote-ref-31)
32. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta,Sinar Grafika, 2009, hal 25-26 [↑](#footnote-ref-32)
33. Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang , 2007, hal 300. [↑](#footnote-ref-33)
34. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hal. 52. [↑](#footnote-ref-34)
35. Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, 2011, *Pemidanaan,* Medan, USU Press, hal.iii. [↑](#footnote-ref-35)
36. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Penerbit Alumni, 1981, hal. 109. [↑](#footnote-ref-36)
37. Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), hal. kata sambutan. [↑](#footnote-ref-37)
38. Alamsyah Citra Negara, “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dlakukan oleh Anak*, (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), hal 36. [↑](#footnote-ref-38)
39. Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hal 7. [↑](#footnote-ref-39)
40. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : PTIK, 2016), hal.5. [↑](#footnote-ref-40)
41. Steers, M Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Erlangga, Jakarta 1985), hal.13 [↑](#footnote-ref-41)
42. Cambel, JP, , *Riset Dalam Efektivitas Organisasi*, (Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta 1989) hal. 89. [↑](#footnote-ref-42)
43. Sondang Siagi, *Filsafat Administrasi*, (Gunung Agung Jakarta , 1991) hal.71 [↑](#footnote-ref-43)
44. Abintoro, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hal, 234. [↑](#footnote-ref-44)
45. Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hal, 308. [↑](#footnote-ref-45)
46. Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011, hal, 21 [↑](#footnote-ref-46)
47. Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba* Jilid 2, PT Tirta Asih Jaya, jakarta 2015, hal 27 [↑](#footnote-ref-47)
48. Julianan lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba priskotropika dan gangguan jiwa*, hal 43 [↑](#footnote-ref-48)
49. Mardani, (2008). “*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional”.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 10 [↑](#footnote-ref-49)
50. Ediwarman, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan, 2016, hal 112 [↑](#footnote-ref-50)
51. Muhammad Erwin, *filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 259. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ediwarman, *Monograf Viktimologi*, Medan, 2017, hal 20 [↑](#footnote-ref-52)
53. Nadhira Rizkia Fatha, ”*Resilensi Pada Mantan Pecandu Narkoba*”, (skripsi) Banda Aceh: Fak. Kedokteran Unsyiah, 2018, hal, 30. [↑](#footnote-ref-53)
54. 9 Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Yogyakarta 2011, hal. 223. [↑](#footnote-ref-54)
55. Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*., Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal.1

    [↑](#footnote-ref-55)
56. Abintoro, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hal. 234 [↑](#footnote-ref-56)
57. Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hal. 308. [↑](#footnote-ref-57)
58. Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011, hal. 21 [↑](#footnote-ref-58)